

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Politik Luar Negeri Indonesia pada masa Orde Baru dibawah Suharto merupakan kebalikan dari Orde Lama dibawah Sukarno.<sup>1</sup> Pandangan Sukarno tentang politik luar negeri sangat kuat dipengaruhi pemikiran-pemikiran anti-kolonialisme yang telah berkembang sejak masa mudanya. Suharto, sebaliknya pandangan luar negerinya tidak terlepas dari pertimbangan dalam negeri. Pengalaman politik yang berbeda membuat keduanya memiliki sudut pandang yang sangat berbeda dalam memahami makna dasar politik luar negeri Indonesia. Semangat anti-kolonialisme Sukarno yang sangat militan disatu pihak memang menguntungkan posisinya sebagai presiden. Bagi Sukarno isu-isu anti kekuatan asing juga membantunya mengidentifikasi kawan dan lawan. Akan tetapi, di sisi lain, fokus pada upaya menghadapi “lawan dari luar” ini membuat kebutuhan untuk memperbaiki kondisi ekonomi terabaikan, terutama pasca kemerdekaan dan pembentukan NKRI.<sup>2</sup> Kondisi perekonomian Indonesia yang terpuruk pada saat itu bukanlah tanpa sebab-akibat. Politik konfrontasi dengan Malaysia sebagai bentuk manifestasi “musuh dari luar” yang diterapkan oleh Sukarnolah yang menjadi penyebab kemerosotan perekonomian Indonesia.

Pada masa pemerintahan Suharto tepatnya setelah dilantik pada tanggal 12 Maret 1967 merupakan momentum yang bersejarah bagi haluan politik domestik

---

<sup>1</sup> Bambang Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007, hal. 89 dalam pembahasan *Meninggalkan Orde Lama Menuju Orde Baru*.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 90

dan politik luar negeri Indonesia. Suharto memandang persoalan dasar Indonesia adalah pembangunan ekonomi.<sup>3</sup> Pada waktu yang sama, ancaman eksternal (diterapkan oleh Sukarno) tidak lagi dipandang sebagai persoalan fundamental bangsa. Indonesia dibawah pemerintahan Suharto memiliki pandangan betapa pentingnya menjalin kerja sama regional (di Asia Tenggara) maupun kerja sama internasional. Lebih jauh lagi, Orde Baru memahami politik luar negeri sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidup dan untuk mempertahankan integritas wilayah.<sup>4</sup> Oleh karena itu, politik luar negeri tidak hanya dipandang dalam pengertian politik militer, tetapi lebih luas lagi dapat dilihat sebagai upaya menciptakan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.<sup>5</sup> Politik Konfrontasi dengan Malaysia yang dilakukan oleh Sukarno dan dampak buruk bagi perekonomian Indonesia itulah yang kemudian mengubah haluan politik luar negeri Indonesia dan mengubah pandangan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Muncul sebuah kesadaran dari Indonesia khususnya dan 4 negara di kawasan Asia Tenggara lainnya yaitu Malaysia, Singapura, Thailand dan Filipina untuk membentuk suatu organisasi regional yang disertai keterikatan antara negara dengan norma dan prinsip guna meminimalisir terulang kembalinya sejarah buruk yang pernah terjadi di Indonesia.

Selain itu faktor internasional (luar kawasan) juga menjadi pertimbangan penting bagi Indonesia dibawah Suharto dalam pembentukan ASEAN. Sebagai

---

<sup>3</sup> Antoni L. Smith, *Indonesia and Politics in Southeast Asia*, hal. 77.

<sup>4</sup> Michael leifer, *Indonesia's Foreign Policy*, London: George Allen and Unwin, 1983, hal. 173.

<sup>5</sup> Dewi Fortuna Anwar, *"Indonesia: Domestic Priorities Define National Security"* dalam Muthiah Alagappa (ed), *Asian Security Practice*, Stanford, California: Stanford University Press, 1998, hal. 484

bangsa yang berdaulat Indonesia memandang penting untuk tidak menggantungkan dirinya secara politik dari Barat.<sup>6</sup> Sebagai bagian dari non-blok sejak awal Indonesia menentang aliansi-aliansi pertahanan karena dinilai akan mereduksi kedaulatan nasional dan membuka pintu bagi dominasi-dominasi negara-negara besar.<sup>7</sup> Karena itulah, Indonesia dibawah Suharto konsisten menentang semua bentuk campur tangan militer Barat di kawasan Asia Tenggara.

Berakhirnya konfrontasi dan keikutsertaan Indonesia dalam pembentukan ASEAN merupakan *blessing in disguise* bagi pembentukan norma hubungan antar negara yang menentang penggunaan kekerasan (*non use of force*). Disamping itu, pembentukan ASEAN pada hakikatnya membuka jalan bagi Indonesia untuk mendapatkan pengaruh tanpa harus menggunakan kekerasan.<sup>8</sup>

Deklarasi Bangkok yang dicetuskan 8 Agustus 1967 merupakan dasar berdirinya *Association of East Asian Nations* atau ASEAN. Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh 5 wakil negara pendirinya, yaitu Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman (Thailand), Narsico Ramos (Filiphina) dan Rajaratman (Singapura) merupakan bentuk nyata pembelajaran bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk membangun keamanan dan meredam saling rasa curiga antar sesama negara kawasan agar kegaduhan dan kekisruhan yang pernah dialami oleh Indonesia tidak terulang dimasa mendatang.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Bambang Cipto, *Hubungan Internasional di Asia Tenggara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007 hal. 91

<sup>7</sup> Dwight King, "Indonesia's Foreign Policy", dalam Wurfel and Burton, *The Political Economy of Foreign Policy in Southeast Asia*, hal. 74.

<sup>8</sup> J. Soedjati Jiwondono, "The Political Security Aspects of ASEAN: Its Principle Achievements," *Indonesian Quartely*, Vol. 11, July 1983, hal. 20.

<sup>9</sup> Sjamsumar Dam dan Riswandi, "*Kerjasama ASEAN: Latar Belakang, Perkembangan dan Masa Depan*" Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995, hal. 57

ASEAN bukanlah suatu kerja sama antar negara di kawasan Asian Tenggara untuk menggalang kerja sama regional baik yang bersifat intra maupun ekstra kawasan yang pertama dan terakhir. Setidaknya ada 5 macam organisasi regional sebelum dibentuknya ASEAN, seperti ASA (Association of Southeast Asia), MAPHILINDO (Malaya, Philipina, Indonesia), SEAMEO (South East Asian Ministers of Education Organization), SEATO (South East Asia Treaty Organization), dan ASPAC (Asia and Pasific Council). Organisasi-organisasi kerja sama regional tersebut lahir dan bergerak dengan dilandasi kesamaan cita-cita yaitu:

*“kesadaran perlunya dibentuk kerja sama untuk meningkatkan taraf hidup antar negara dalam kawasan Asia Tenggara, meredakan rasa saling curiga dan mendorong kerja sama”<sup>10</sup>*

Tujuan dasar pembentukan ASEAN sebagaimana dicerminkan dalam Deklarasi Bangkok Agustus 1967 adalah memulihkan hubungan-hubungan intraregional dan menyusunnya dalam struktur suatu tata Asia Tenggara berdasarkan prinsip saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai, apa pun sistem sosial-ekonomi masing-masing negara anggota. Sasaran dan tujuan utama dalam ASEAN adalah memajukan kerja sama ekonomi dan sosial budaya berdasarkan struktur baru tersebut:

*“to accelerate the economic growth, social progress and cultural development in the region through joint endeavors in the spirit of equality and partnership in the order to strengthen the foundation for a prosperous and peaceful community of South East Asia Nation” (untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan kebudayaan di kawasan ini melalui usaha-usaha bersama dalam semangat persamaan*

---

<sup>10</sup> Bahan presentasi dari Kemlu, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN pada tanggal 16 Desember 2008 di UMY.

*dan kemitraan untuk memperkuat landasan bagi sebuah masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara yang makmur dan damai.)”<sup>11</sup>*

Adapun point dari Deklarasi Bangkok tersebut adalah:

*“Membentuk suatu landasan yang kokoh dalam meningkatkan kerja sama regional di kawasan Asia Tenggara dengan semangat keadilan dan kemitraan dalam rangka menciptakan perdamaian, kemajuan dan kemakmuran kawasan”*

ASEAN merupakan salah satu organisasi regional yang selalu bergerak dinamis terhadap kebutuhan dunia internasional, sepanjang sejarah sejak berdirinya ASEAN hingga saat ini telah banyak perkembangan-perkembangan positif baik dari struktur organisasi, keanggotaan hingga fungsi dan tujuan ASEAN yang terus menyesuaikan diri di dalam dinamika perpolitikan internasional. **Pertama** mengenai struktur organisasi ASEAN. untuk melaksanakan sasaran, cita-cita, maksud dan tujuan ASEAN tersebut dibentuk suatu struktur organisasi ASEAN yang pada waktu itu terdiri dari *Annual Ministerial Meeting (AMM)*, *Standing Committee (SC)*, *Permanent Committee (PC)*, *Ad-Hoc Committee (AC)*, *National Secretariats* di setiap negara anggota. AMM merupakan instansi tertinggi ASEAN yang harus diadakan setiap tahun secara bergilir di negara anggota. SC dipimpin oleh Menlu anggota yang akan menjadi tuan rumah AMM berikutnya dan tugas utamanya adalah untuk merekomendasikan dan melaksanakan program-program yang telah disepakati dalam AMM sebagai program ASEAN. Sedangkan PC memiliki tugas untuk me,berikan rekomendasi terhadap rencana program ASEAN dan melaksanakan

---

<sup>11</sup> C.P.F Luhulima, *ASEAN menuju postur baru*, Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, 1997

program tersebut setelah mendapat persetujuan dari AMM. Selain itu, terdapat beberapa *Ad-Hoc Committee* sesuai dengan kebutuhan ASEAN, seperti *Special Coordinating Committee of ASEAN* (SCCAN), *ASEAN Brussel Committee* (ABC) dan *ASEAN Geneva Committee* (AGC) dan *Special Committee of Central Banks and Monetary Authorities*. Di setiap negara anggota juga didirikan pula Sekretariat Nasional ASEAN, yang berkewajiban untuk mengkoordinasi tanggapan nasional terhadap hasil-hasil yang telah dicapai ASEAN dan mempersiapkan agenda pertemuan SC.

Berdasarkan struktur yang telah ditetapkan dalam Deklarasi Bangkok 1967, ternyata jalan organisasi ASEAN sangat lambat, sangat birokrasi dan cenderung menunggu tanggapan dari Menlu masing-masing negara anggota yang sangat sibuk dengan hubungan multilateral negaranya.<sup>12</sup> Untuk itu, dalam KTT Bali yang dilaksanakan bulan Februari tahun 1976, ditetapkan struktur baru organisasi ASEAN. Kesepakatan mengenai struktur baru ASEAN menempatkan pertemuan kepala pemerintahan (KTT) merupakan instansi tertinggi ASEAN. sedangkan instansi berikutnya, yaitu AMM dilengkapi dengan pertemuan menteri ekonomi (EMM) dan pertemuan menteri lainnya (OMM). SC masih tetap diadakan dengan tugas yang diperluas seperti mempersiapkan dialog dengan mitra dialog ASEAN, seperti AS, Jepang, MEE, UNDP/ESCAP, Canada, Australia, New Zealand, dan negara-negara super power lainnya. selain itu, SC juga mengawasi Komite Anggaran dan Komite Pengawasan, yang paling penting adalah dibentuknya *ASEAN Secretariat* yang telah ditetapkan di Jakarta, yang diharapkan

---

<sup>12</sup> Sjamsumar Dam dan Riswandi, "*Kerjasama ASEAN: Latar Belakang, Perkembangan dan Masa Depan*" Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995, disimpulkan dari hal. 59-60.

dapat mengatasi kemacetan-kemacetan yang dialami sebelumnya. Sebagaimana yang sudah dikemukakan sebelumnya bahwa di setiap negara anggota dibentuk suatu Sekretariat Nasional ASEAN yang dipimpin oleh seorang Sekjen (setelah reorganisasi, menjadi salah satu Direktorat Jenderal dari masing-masing Kemlu negara anggota) dan kini dipimpin oleh seorang Dirjen ASEAN.

*Kedua* mengenai perluasan kenggotaan. Sejak ASEAN berdiri pada tahun 1967, sudah dinyatakan bahwa perhimpunan ASEAN terbuka bagi partisipasi seluruh negara di wilayah Asia Tenggara untuk menjadi anggota ASEAN dengan persyaratan bahwa negara tersebut dapat menghormati cita-cita, prinsip, norma dan tujuan ASEAN sebagaimana yang tertuang dalam setiap Deklarasi dan keputusan-keputusan ASEAN selama ini. Berdasarkan hal itulah Brunei Darussalam diterima menjadi anggota ASEAN yang ke-6 pada tanggal 7 Januari 1984. Dengan terjadinya perubahan konfigurasi politik internasional pada pertengahan 80'an hingga 90'an memaksa negara-negara Myanmar, Laos, Vietnam dan Kamboja untuk bergabung ke dalam organisasi regional ASEAN.<sup>13</sup> Bergabungnya 4 negara komunis (kini sedang dalam proses Demokratisasi) dan bahkan terdapat wacana untuk memasukkan Timor Leste sebagai negara anggota yang ke-11<sup>14</sup> menunjukkan bahwa semakin meningkatnya kepercayaan negara-negara di kawasan Asia Tenggara kepada organisasi ASEAN sebagai organisasi yang dapat membawa stabilitas dalam negerinya terlebih lagi ASEAN saat itu hingga sekarang menekankan kerja sama ekonomi, sosial dan budaya. Inilah yang menjadi daya tarik ASEAN karena menurut pandangan pemimpin negara-negara

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 60.

<sup>14</sup> Lihat SKH *Kompas* edisi Agustus 2010, diakses tanggal 29 September 2010.

anggota ASEAN dalam upaya mencapai stabilitas politik setiap negara anggota harus mengintensifkan kerja sama dalam pembangunan ekonomi dan sosial, dengan penekanan khusus pada “peningkatan keadilan sosial dan perbaikan tingkat kehidupan rakyatnya.”<sup>15</sup>

*Ketiga*, keunggulan lain yang dimiliki oleh ASEAN adalah ASEAN terus dapat menyesuaikan diri dan menjadi mitra negara super power dalam dinamika perpolitikan internasional. Sejarah berdirinya ASEAN merupakan strategi dari negara-negara kawasan Asia Tenggara untuk membendung dan menghambat masuknya tekanan dari negara-negara luar terutama dari negara-negara maju agar tidak terjadi hubungan yang bersifat Ketergantungan antara negara sedang berkembang (mayoritas negara di Asia Tenggara) dengan negara maju (AS, Australia, New Zealand, Jepang, dan lain-lain). Keinginan dari negara-negara anggota ASEAN terutama Indonesia adalah negara-negara ASEAN harus dapat mengimbangi kekuatan negara-negara super power melalui peningkatan kerja sama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan yang pada akhirnya akan bermuara pada posisi tawar yang kuat di depan negara super power tersebut. Sebagai contoh adalah KTT ASEAN-AS yang dilangsungkan di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York akhir September 2010 lalu, KTT itu merupakan KTT yang kedua setelah di Singapura tahun lalu Presiden Barrack Obama memprakarsai pertemuan rutin ASEAN-AS, isu yang diangkat ASEAN-AS ini pun merupakan isu yang sangat strategis bagi ASEAN dan Indonesia terutama

---

<sup>15</sup> *The Bangkok Declaration*, 8 Agustus 1967 dan *Declaration of ASEAN Concord*, Bali, 24 Februari 1976.

yaitu isu keamanan regional, pendidikan, kehutanan dan perdagangan.<sup>16</sup> Ini mengindikasikan bahwa ASEAN telah menjadi organisasi regional yang cukup berpengaruh dan berpeluang besar menjadi mitra dialog dengan negara sekelas AS.

Kini usia ASEAN telah menginjak 43 tahun. Banyak prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh ASEAN baik bagi intra-regional maupun ekstra-regional. Penyelesaian konflik antar negara anggota ASEAN, stabilitas ekonomi global, kerja sama dalam bidang sosial budaya, mengkonduisikan perekonomian dunia pasca krisis keuangan global hanyalah sekelumit kecil dari hasil positif kinerja ASEAN selama ini yang membuat ia menjadi salah satu organisasi kawasan paling stabil dan cukup diperhitungkan oleh negara adidaya sekelas Amerika Serikat sekalipun.

Namun, pencapaian-pencapaian positif ASEAN secara keseluruhan selama ini tidak membuat negara-negara anggota ASEAN menjadi berbangga hati dan berhenti untuk menciptakan terobosan-terobosan baru untuk mempererat hubungan intra ASEAN dengan cara menjalin kerja sama yang semakin intens dan isu yang diangkat pun semakin kompleks. Berdasarkan semangat dan pedoman dari Deklarasi Bangkok 1967, ASEAN semakin menggelorakan dirinya untuk meningkatkan kerja sama baik intra maupun ekstra kawasan terutama antar sesama negara berkembang (NSB), seperti pengembangan program dan proyek kerja sama teknik antarnegara sedang berkembang (*Technical Co-operation among Developing Countries/ TCDC*) di antara ASEAN dan ECOWAS (*the*

---

<sup>16</sup> Lihat [www.voaindonesia.com](http://www.voaindonesia.com) edisi 29 September 2010.

*Economic Community of West African State*). Selain itu pada tahun 1979, Menteri-menteri Ekonomi ASEAN menyepakati kerja sama di bidang ekonomi dengan Biro Pasifik Selatan (*the South Pacific Bureau for Economic Co-operation/ SPEG*).<sup>17</sup>

ASEAN di era perkembangan globalisasi dan interdependensi sedang menghadapi dua dinamika yang menuntutnya untuk bertransformasi ke dalam organisasi regional yang makin terbuka dengan negara luar regional, organisasi yang berdasarkan atas ketentuan hukum (*rules-based*) dan berorientasikan kepentingan rakyat (*people-centered*), serta organisasi yang memiliki status hukum dan kapasitas melakukan tindakan hukum (*legal personality*). Adapun dua dinamika yang tengah dihadapi ASEAN dan menuntutnya bertransformasi ke dalam suatu komunitas adalah<sup>18</sup>:

**Pertama** adalah Dinamika Internal negara-negara kawasan Asia Tenggara:

1. Kebutuhan menjamin implementasi perjanjian yang telah ditandatangani
2. Peningkatan bentuk kerja sama melalui berbagai program dan aktivitas
3. Kebutuhan untuk memperkuat solidaritas, persatuan, keamanan regional, reformasi bentuk pemerintahan di masing-masing negara anggota, penegakan HAM dan persamaan azas politik warga negara dan resolusi konflik internal. Khusus point ketiga, negara ASEAN memberikan perhatian lebih mendalam yang terdapat dalam rencana pembentukan Komunitas ASEAN 2015 (Komunitas Keamanan/APSC), perhatian yang

---

<sup>17</sup> C.P.F Luhulima, *ASEAN Menuju postur baru*, Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1997, hal. 6

<sup>18</sup> Bahan presentasi dari Kemlu, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN pada tanggal 16 Desember 2008 di UMY.

lebih ini didasarkan pada konflik berkepanjangan antara MILF (*Moro Islamic Liberation Front*) dengan pemerintah Filipina, konflik Pattani di Thailand, Di saat yang bersamaan, perkembangan politik di negara-negara anggota ASEAN terus bergulir bersamaan dengan perkembangan masyarakat sipil di negara-negara tersebut, situasi politik di Myanmar yang dampaknya sangat dirasakan negara anggota ASEAN lainnya. Memburuknya situasi politik di Myanmar disebabkan oleh dominasi militeristik para junta yang telah melecehkan hasil pemilu demokratis yang memilih Aung San Syu Kii dan yang baru-baru ini terjadi yaitu memanasnya hubungan antara Indonesia dan Malaysia soal batas wilayah negara. Belum lagi masalah terrorisme yang merupakan bagian dari *keamanan non-tradisional*.

**Kedua** yaitu Dinamika Eksternal yang datang dari negara-negara di luar kawasan Asia Tenggara:

1. Munculnya kekuatan-kekuatan baru di kawasan (China dan India)
2. Kebangkitan kembali Jepang sebagai kekuatan regional
3. Persaingan antara negara-negara super power seperti Amerika Serikat dengan Iran, Amerika Serikat dengan China dan kembali memanasnya hubungan Korut-Korsel.

Dinamika internal dan eksternal yang tengah dihadapi ASEAN saat ini memaksa ASEAN untuk memperkuat netralitas sebagai organisasi regional yang mengedepankan dialog ketimbang konflik militer sebagaimana dalam prinsip

pembentukan ASEAN dan meminimalisir terjadinya efek bola salju dari persaingan negara-negara super power.

Dan tibalah momentum bagi pendewasaan ASEAN untuk bergerak maju lebih jauh. Kerja sama ASEAN kini menuju tahapan baru yang lebih integratif dan berwawasan ke depan dengan akan dibentuknya Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) pada tahun 2015. Hal ini diperkuat dengan disahkannya Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) yang secara khusus akan menjadi landasan hukum dan landasan jati diri ASEAN ke depannya.<sup>19</sup>

Pembentukan Komunitas ASEAN diawali dengan komitmen para pemimpin ASEAN dengan ditandatanganinya *ASEAN Vision 2020* di Kuala Lumpur pada tahun 1997 yang mencita-citakan ASEAN sebagai suatu komunitas yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan dalam pembangunan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli.<sup>20</sup> Namun baru terealisasi pada Oktober 2003, melalui *Declaration of ASEAN Concord II* yang dihasilkan pada Pertemuan Puncak ASEAN ke-9 di Bali, para pemimpin ASEAN memproklamkan pembentukan Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) yang terdiri atas tiga pilar, yakni Komunitas Keamanan ASEAN (ASC), Komunitas Ekonomi (AEC) dan Komunitas Sosial-Budaya (ASCC) yang saling mengikat dan memperkuat untuk mencapai tujuan bersama demi menjamin perdamaian yang

---

<sup>19</sup> Sebagaimana yang disampaikan oleh **Dian Triansyah Djani, MA** Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN, Kemlu RI dalam sebuah seminar pada bulan November 2008 di Jakarta.

<sup>20</sup> CPF Luhulima, Dewi Fortuna Anwar, Ikrar Nusa Bhakti, Yasmin Sungkar dan Ratna Shofi Inayati, "*Masyarakat Asia Tenggara Menuju Komunitas ASEAN 2015*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hal. 5-8.

dapat dipertahankan, stabilitas dan kemakmuran yang terbagi di kawasan Asia Tenggara. Tiga pilar pendukung Komunitas ASEAN ini menjadi paradigma baru yang akan menggerakkan kerja sama ASEAN kearah komunitas dan identitas baru yang lebih mengikat.

Indonesia yang pada saat itu menjadi Ketua ASEAN terdorong untuk mengajukan konsep Komunitas Keamanan ASEAN (ASC). Indonesia mengharapkan Komunitas Keamanan ASEAN dapat terbentuk sejalan dengan pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN yang telah diajukan sebelumnya oleh Singapura pada KTT ke-8 tahun 2002 di Cambodia. Dua konsep tersebut diharapkan terealisasi pada tahun 2020 guna mewujudkan suatu Komunitas ASEAN. KTT ASEAN ke-10 di Vientiane, Laos pada November 2004 telah menyepakati *Program of Action (PoA)* untuk pilar keamanan dan pilar sosial-budaya. Program ini merupakan pedoman ASEAN untuk jangka pendek dan menengah (2004-2010), yang berfokus pada upaya untuk memperdalam integrasi regional dan mempersempit kesenjangan dalam ASEAN.

Pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina pada 12-13 Januari 2007 telah dicapai suatu keputusan penting, yakni kesepakatan mencapai Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Para pemimpin ASEAN bersepakat untuk memiliki komitmen menciptakan *One Caring and Sharing Community* pada tahun 2015, lima tahun lebih awal dari yang dicanangkan di Kuala Lumpur pada tahun 1997 dan melakukan sosialisasi agar rakyat ASEAN memiliki “Rasa Kekitaan” (*We Feeling*). Komunitas ASEAN akan diwarnai pencapaian kerja sama, solidaritas, bersama melawan kemiskinan, dan menikmati rasa aman termasuk keamanan

manusia (*human security*). Para pemimpin negara-negara ASEAN menandatangani “*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*” sebagai kesepakatan untuk mempercepat terbentuknya Komunitas ASEAN.

Kesepakatan lain dalam KTT Cebu adalah melanjutkan kesepakatan KTT ke-11 ASEAN mengenai pembentukan *ASEAN Charter* (Piagam ASEAN) yang akan menjadi semacam norma hukum atau Undang-Undang Dasar ASEAN dengan dicetuskannya Deklarasi Cebu tentang Cetak Biru Piagam ASEAN. Salah satu tujuannya adalah untuk membuat ASEAN lebih berpijak pada kepentingan rakyat, karena selama ini muncul kesan bahwa ASEAN seperti sebuah klub para pejabat pemerintah dan diplomat dari negara-negara ASEAN (*state oriented*). Dengan pengembangan piagam ini diharapkan ASEAN akan lebih menyentuh kepentingan rakyat (*people oriented*). Blanche Lincoln mengatakan, “*it is about our personal responsibility to strengthen our community. This is about making us strong enough and leaving a legacy*”. Senada dengan Lincoln, Everent Dirksen mengatakan, “*when all said and done, the real citadel of strength of any community is in the hearts and minds and desires of those who well there*”. Dua kutipan ini<sup>21</sup> menjadi catatan penting bagi pemerintah dan masyarakat kawasan Asia Tenggara sebagai saksi perjalanan organisasi regional.

Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) itu sendiri selesai diratifikasi oleh seluruh negara anggota ASEAN pada 21 Oktober 2008 dan baru dapat terealisasi

---

<sup>21</sup> Edge Life Magazine, July 2005. <http://www.edgelifemagazine.net/glosary/community.htm>, hal. 3, diakses pada 27 September 2010.

(mulai berlaku) sejak tanggal 15 Desember 2008. Dengan disepakatinya Piagam ASEAN, ASEAN terlahir kembali menjadi suatu organisasi kawasan yang sama sekali baru, dengan aturan hukum yang jelas dan memiliki legal personality. Dilengkapi *moto one vision, one identity, one community*, ASEAN terus melangkah menuju terbentuknya suatu Komunitas ASEAN 2015<sup>22</sup>. Dan bahkan pada pembukaan Piagam ASEAN secara tegas menyebutkan komitmen masyarakat (*We, the Peoples of Association of South East Asia Nation*) negara anggota ASEAN untuk mempercepat pembentukan Komunitas ASEAN 2015 yang didasarkan pada tiga pilar, yaitu kerja sama politik dan keamanan, kerja sama ekonomi, dan kerja sama sosial budaya.<sup>23</sup>

Pada pertemuan puncak ke-14 ASEAN di Hua Hin, Thailand, ditutup dengan penandatanganan Deklarasi Peta Jalan Menuju Komunitas ASEAN 2009-2015 berdasarkan Piagam ASEAN oleh para Kepala Negara/Pemerintahan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Indonesia adalah salah satu negara yang mempelopori terbentuknya Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015), ada beberapa poin penting yang ditunjukkan oleh Indonesia dalam mengusulkan norma atau nilai yang mengikat negara-negara kawasan seperti ASEAN, hal ini didasarkan pada<sup>24</sup>:

---

<sup>22</sup> *Cikarangoonline.com/.../blogger-duta-informasi-dan-sosialisasi-pengembangan-komunitas-asean.html*, diakses pada tanggal 07 September 2010

<sup>23</sup> Diakses dari pada tanggal 07 September 2010 dari BLOG DIPLOMATIK Portal Kemlu: *blog.deplu.go.id/post/2010/01/11/tes.aspx* posting 11 January 2010

<sup>24</sup> lihat tulisan Hendrajit mengenai “*Myanmar dan Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 Dua Isu Krusial Pada KTT ASEAN di Thailand*” diakses pada tanggal 24-10-2009

1. Kebutuhan menggalang kerja sama yang lebih erat antar negara di kawasan guna memajukan perdamaian, keamanan dan kemakmuran.
2. Keamanan hanya bisa dicapai melalui upaya bersama secara kooperatif.
3. Untuk membangun tatanan keamanan, politik, ekonomi dan sosial yang lebih adil.
4. Untuk memajukan keadilan dan kepatuhan terhadap aturan-aturan hukum internasional.

Lebih lanjut lagi, Komunitas ASEAN 2015 yang disepakati melalui Deklarasi Chiang Mai bertujuan untuk menjadikan ASEAN sebagai "kawasan yang damai, demokratis, terbuka, adil, transparan, toleran, inklusif, harmonis dengan pasar dan basis produksi tunggal, serta berorientasi kepada masyarakat".<sup>25</sup> Dapat dikatakan, dengan adanya Komunitas ASEAN 2015 ini, negara-negara ASEAN tengah bersiap-siap mengintegrasikan diri mereka ke dalam suatu sistem yang memiliki tantangan jauh lebih kompleks dalam setiap pembahasan isu kawasan maupun global serta menuntut campur tangan dari semua pihak (komunitas masyarakat, LSM, Civil Society, dll) dalam menjalankan setiap kebijakan dan pemecahan masalah dikemudian hari.

Selain itu juga dari kacamata pemimpin ASEAN, pembentukan Komunitas ASEAN ini merupakan transformasi lanjutan dari keberhasilan ASEAN dalam menjadi region paling stabil di dunia. Jika kita membandingkan keadaan ASEAN

---

<sup>25</sup> Surat Kabar Harian *Kompas* tanggal 31 Desember 2009

dengan keadaan region lain, seperti di Timur Tengah, Semenanjung Korea, atau Afrika, pencapaian yang sering dirasakan sebagai hal normal ini masih dirasakan oleh region tersebut sebagai capaian yang masih jauh diraih. Hal inilah yang menyemangati para pemimpin ASEAN untuk mengakselerasi pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015.<sup>26</sup>

Secara geopolitik dan geoekonomi, Indonesia di kawasan Asia Tenggara memiliki peran yang cukup strategis dan dominan dalam menentukan nasib organisasi regional ASEAN ke depannya. Hal itu dilihat dari keaktifan dan kedinamisan Indonesia dalam rencana pembentukan Komunitas ASEAN 2015, dipembahasan-pembahasan sebelumnya terlihat jelas bahwa Indonesia sebagai inisiator pembentukan Komunitas ASEAN 2015, aktif dalam setiap pertemuan untuk membahsan proses pembentukan Komunitas ASEAN 2015 dan juga komitmen yang kuat dari Indonesia untuk mengimplementasikan pilar-pilar Komunitas ASEAN 2015 yang tertuang dalam Piagam ASEAN (ASEAN Charter). Berbicara mengenai segala bentuk tindakan dan peran Indonesia dalam Komunitas ASEAN 2015 tentu tidak lepas dari kepentingan nasional Indonesia maupun kepentingan dari politik luar negeri Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

---

<sup>26</sup> Diakses dari [www.undiplibrary.ac.id](http://www.undiplibrary.ac.id), diposting pada tanggal 12 February 2008 dan diakses tanggal 25 Agustus 2010 dengan judul "*Menuju Komunitas ASEAN 2015*"

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan melihat latar belakang masalah diatas, kali ini penulis akan mengajukan pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penyusunan skripsi ini. Adapun pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah

**“apa kepentingan Indonesia memprakarsai pembentukan Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015) ?**

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Di dalam penelitian ini, penulis hendak mengulas lebih jauh hakikat mengenai organisasi regional ASEAN dari segi latar belakang pembentukan hingga perkembangan sampai saat ini dan juga mengkaji lebih dalam seperti apa Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015) yang memiliki tiga pilar utama.
2. Ingin mengetahui seberapa besar dan pentingnya peran Indonesia di dalam perkembangan ASEAN untuk bertransformasi menjadi sebuah Komunitas atau (Uni ASEAN).
3. Dalam tulisan ini penulis hendak menunjukkan kepentingan Indonesia sebagai inisiator pembentukan Komunitas ASEAN 2015 berupa posisi tawar yang kuat di mata Internasional baik secara kelembagaan ASEAN maupun atas nama negara Indonesia.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Berbicara mengenai perilaku politik baik domestik maupun internasional, tentu tidak ada satu negara pun yang mampu lepas dari interaksi dengan negara lain. Setiap terciptanya suatu kelompok atau interaksi kolektif negara, tidak bisa dipungkiri bahwa setiap negara membawa kepentingannya masing-masing yang terkadang bertolak belakang antar kepentingan negara satu dengan negara lainnya. Perbedaan kepentingan antar negara merupakan sesuatu yang alamiah, yang bukan tindakan alamiah adalah cara bagaimana kepentingan itu dicapai, dengan perengkah, konflik atau bahkan kerja sama? Hal itu tergantung dari situasi internal dan eksternal dari suatu negara.

Dalam tulisan ini, penulis akan berfokus pada bentuk kerja sama sebagai strategi mencapai kepentingan nasional yang terintepretasi ke dalam sebuah regionalisme. Pada dasarnya negara dapat bekerja sama dengan negara lain tanpa dibatasi oleh letak geografis, struktur atau kelas-kelas negara, persamaan historis atau pun dari latar belakang sejarah yang memiliki kesamaan. Namun yang terjadi adalah kerja sama regional (kerja sama yang didasarkan pada kedekatan geografis dan kemiripan budaya) lebih banyak mewarnai dinamika politik internasional dan terbukti mampu bertahan sebagai upaya untuk mencapai kepentingan nasional masing-masing negara. Untuk memperjelas tulisan ini penulis menggunakan konsep-konsep berikut sebagai kerangka pemikiran:

## 1. Konsep Politik Luar Negeri

Sebelum melangkah lebih jauh ada baiknya jika kita memahami definisi dari politik luar negeri. Salah satu definisi yang paling populer dan sering digunakan oleh intelektual adalah

*“Foreign policy, then, can be characterized as the sum of official external relations conducted by an independent actor (usually a state) in international relations. Such a definition is short enough to be of practical use, while retaining sufficient flexibility to incorporate the changes that have occurred and continue to occur in the nature of modern international politics. To take the components of the definition: “international relations” refers to the web of transactions across state boundaries by all kinds of groups and individuals, and “external relations” to the same activities from the point of view of these actors as they move outside their own society into dealings with others.”*<sup>27</sup>

Namun yang perlu dicatat adalah dalam mempelajari politik luar negeri,<sup>28</sup> pengertian dasar yang harus kita ketahui yaitu politik luar negeri itu pada dasarnya merupakan “*action theory*”, atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan ke negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara pengertian umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus

---

<sup>27</sup> Yaacov Y. I. Vertzberger, *The World in Their Minds: Information Processing, Cognition and Perception in Foreign Policy Decision Making*, California: Stanford, 1990. Tak didapati halaman karena berupa soft copy

<sup>28</sup> Disampaikan pada acara Ceramah Sistem Politik Luar Negeri bagi Perwira Siswa Sekolah Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (Sesko TNI AU) Angkatan ke-44 TP 2007, Bandung, 16 Mei 2007.

<sup>29</sup> Dosen Senior pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran (UNPAD).

menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya.

Salah satu cara untuk memahami konsep politik luar negeri adalah dengan jalan memisahkannya ke dalam dua komponen: politik dan luar negeri. Politik (*policy*) adalah seperangkat keputusan yang menjadi pedoman untuk bertindak, atau seperangkat aksi yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Policy itu sendiri berakar pada konsep “pilihan (*choices*)”: memilih tindakan atau membuat keputusan-keputusan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan gagasan mengenai kedaulatan dan konsep “wilayah” akan membantu upaya memahami konsep luar negeri (*foreign*). Kedaulatan berarti kontrol atas wilayah (dalam) yang dimiliki oleh suatu negara. Jadi, politik luar negeri (*foreign policy*) berarti seperangkat pedoman untuk memilih tindakan yang ditujukan ke luar wilayah suatu negara.

Pemahaman konsep ini diperlukan agar dapat membedakan antara politik luar negeri dan politik domestik (dalam negeri). Namun, tidak dapat dipungkiri pula bahwa pembuatan politik luar negeri selalu terkait dengan konsekuensi-konsekuensi yang ada di dalam negeri. Meminjam istilah dari Henry Kissinger, seorang akademisi sekaligus praktisi politik luar negeri Amerika Serikat, menyatakan bahwa “*foreign policy begins when domestic policy ends*”.<sup>30</sup> Dengan kata lain studi politik luar negeri berada pada intersection antara aspek dalam negeri suatu negara (domestik) dan aspek internasional (eksternal) dari kehidupan suatu negara. Karena itu studi politik luar negeri tidak dapat menisbikan struktur

---

<sup>30</sup> Wolfram F. Hanrieder. *Comparative Foreign Policy: Theoretical Essays*, New York: David McKay Co, 1971, hal. 22.

dan proses baik dari sistem internasional (lingkungan eksternal) maupun dari sistem politik domestik. Dari pernyataan di atas sulit bagi kita untuk memisahkan antara politik luar negeri dengan politik dalam negeri. Pemisahan ini hanya dimungkinkan untuk keperluan analisis atau penelitian dalam Hubungan Internasional

Walau bagaimanapun, dari uraian mengenai definisi maupun konseptual dari politik luar negeri, menurut penulis substansi dari politik luar negeri adalah kebijakan atau keputusan politik suatu negara yang telah melalui pertimbangan dan kalkulasi rasionalitas yang diperuntukkan bagi negara-negara lain dan bersifat mutlak lintas batas yuridiksi negara.

Tujuan dari kebijakan luar negeri sebenarnya merupakan fungsi dari proses dimana tujuan negara disusun. Tujuan tersebut dipengaruhi oleh sasaran yang dilihat dari masa lalu dimana aspirasi untuk masa yang akan datang. Tujuan kebijakan luar negeri dibedakan atas tujuan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Pada dasarnya tujuan jangka panjang kebijakan luar negeri adalah untuk mencapai perdamaian, keamanan, dan kekuasaan.<sup>31</sup> Sementara itu, Jack C. Plano berpendapat bahwa setiap kebijakan luar negeri dirancang untuk menjangkau tujuan nasional. Tujuan nasional yang hendak dijangkau melalui kebijakan luar negeri merupakan formulasi konkret dan dirancang dengan mengaitkan kepentingan nasional terhadap situasi internasional yang sedang berlangsung serta power yang dimiliki untuk mengjangkaunya. Tujuan dirancang, dipilih, dan ditetapkan oleh pembuat keputusan dan dikendalikan untuk mengubah

---

<sup>31</sup> James N. Rosenau, *International Politics and Foreign Policy: A Reader in Research and Theory*, New York: The Free Press, 1969, hal. 167

kebijakan (*revisionist policy*) atau mempertahankan kebijakan (*status quo policy*) ihwal kenegaraan tertentu di lingkungan internasional.<sup>32</sup>

Tujuan politik luar negeri dapat dikatakan sebagai citra mengenai keadaan dan kondisi di masa depan suatu negara dimana pemerintah melalui para perumus kebijaksanaan nasional mampu meluaskan pengaruhnya kepada negara-negara lain dengan mengubah atau mempertahankan tindakan negara lain. Ditinjau dari sifatnya, tujuan politik luar negeri dapat bersifat konkret dan abstrak. Sedangkan dilihat dari segi waktunya, tujuan politik luar negeri dapat bertahan lama dalam suatu periode waktu tertentu dan dapat pula bersifat sementara, berubah sesuai dengan kondisi waktu tertentu.

Bahkan seorang ahli politik dan konflik internasional K.J. Holsti menjabarkan tiga kriteria untuk mengklasifikasikan tujuan-tujuan politik luar negeri yang diambil suatu negara, yaitu:

1. Nilai (values) yang menjadi tujuan dari para pembuat keputusan.
2. Jangka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain ada tujuan jangka pendek (short-term), jangka menengah (middleterm), dan jangka panjang (long-term).
3. Tipe tuntutan yang diajukan suatu negara kepada negara lain.<sup>33</sup>

Konsep lain yang melekat pada tujuan politik luar negeri adalah kepentingan nasional (national interersts) yang didefinisikan sebagai konsep abstrak yang meliputi berbagai kategori/ keinginan dari suatu negara yang berdaulat. Kepentingan nasional terbagai ke dalam beberapa jenis :

---

<sup>32</sup> Jack C. Plano dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin, 1999, hal. 6.

<sup>33</sup> Bruce Russet dan Harvey Starr, *World Politics: The Menu for Choice*. 2nd ed, New York: W.H. Freeman and Co, 1988, hal. 190-193.

- a. *Core/basic/vital interests*; kepentingan yang sangat tinggi nilainya sehingga suatu negara bersedia untuk berperang dalam mencapainya. Melindungi daerah-daerah wilayahnya, menjaga dan melestarikan nilai-nilai hidup yang dianut suatu negara merupakan beberapa contoh dari *core/basic/ vital interest* ini.
- b. *Secondary interests*, meliputi segala macam keinginan yang hendak dicapai masing-masing negara, namun mereka tidak bersedia berperang dimana masih terdapat kemungkinan lain untuk mencapainya melalui jalan perundingan misalnya.

Politik Luar Negeri merupakan suatu studi yang kompleks karena tidak saja melibatkan aspek-aspek eksternal akan tetapi juga aspek-aspek internal suatu negara.<sup>34</sup> Negara, sebagai aktor yang melakukan politik luar negeri, tetap menjadi unit politik utama dalam sistem hubungan internasional, meskipun aktor-aktor non-negara semakin memainkan peran pentingnya dalam hubungan internasional.

Dalam kajian politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi output. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan politik luar negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan eksternal maupun internal dengan

---

<sup>34</sup> James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson, *World Politics: An Introduction*, New York: The Free Press, 1976, hal. 15.

mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya.<sup>35</sup>

Kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh pemerintah suatu negara memang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional masyarakat yang diperintahnya meskipun kepentingan nasional suatu bangsa pada waktu itu ditentukan oleh siapa yang berkuasa pada waktu itu. Untuk memenuhi kepentingan nasionalnya itu, negara-negara maupun aktor dari negara tersebut melakukan berbagai macam kerja sama diantaranya adalah kerja sama bilateral, trilateral, regional dan multilateral.

Dalam kaitan antara politik luar negeri Indonesia di kawasan dan transformasi baru ASEAN ke dalam sebuah Komunitas ASEAN adalah karena ASEAN merupakan lingkaran terdalam dari lingkaran-lingkaran konsentris pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Pendekatan lingkaran-lingkaran konsentris menegaskan besarnya pengaruh lingkungan eksternal terdekat terhadap situasi domestik Indonesia. Oleh karena itu, terciptanya kawasan Asia Tenggara yang stabil, aman, damai dan kondusif, serta terjalinnya hubungan harmonis dengan negara-negara di Asia Tenggara dirasakan sangat penting dan merupakan modal dasar pembangunan nasional Indonesia.<sup>36</sup>

Indonesia berkeinginan dan berkeyakinan bahwa Asia Tenggara dapat berkembang menjadi kawasan regional yang mandiri dan damai. Hal ini sejalan dengan Alinea IV Pembukaan UUD 1945 yang menggariskan bahwa salah satu

---

<sup>35</sup> James N. Rosenau, *The Scientific Study of Foreign Policy*. New York: The Free Press, 1980, hal. 171-173.

<sup>36</sup> Dalam buku “*ASEAN Selayang Pandang*”, Direktorat Jenderal Kerja sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, 137-138, 2007.

tujuan penyelenggaraan hubungan dan politik luar negeri adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu melindungi kepentingan bangsa dan negara, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut menjaga perdamaian dan ketertiban dunia.

Mengingat Indonesia menempatkan ASEAN sebagai lingkungan utama dari politik luar negerinya, Indonesia telah memainkan peran penting dalam perkembangan ASEAN. Peran penting tersebut, terutama terlihat dari peran Indonesia dalam penentuan arah perkembangan ASEAN. Dalam pembentukan Komunitas ASEAN, Indonesia memainkan peran utama (*leading role*) sebagai salah satu perumus Komunitas ASEAN dan penggagas konsep Komunitas Keamanan ASEAN. ASEAN yang dulunya asosiasi bersifat longgar kini sedang beralih menjadi organisasi yang lebih terarah dan terintegrasi.

Kontribusi-kontribusi Indonesia dalam proses pembentukan Komunitas ASEAN 2015 tidak terlepas dari kepentingan-kepentingan tertentu yang merepresentasikan kondisi internal untuk kemudian dapat di akomodir dalam kerja sama regional Asia Tenggara yang kian terbuka dengan negara-negara lain yang berkepentingan dengan ASEAN.

## **2. Konsep Kerja sama Regional**

Salah satu konsep yang digunakan oleh penulis adalah konsep Kerja sama Regional, sebelum masuk lebih jauh mengenai konsep ini, ada baiknya memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kerja sama regional. Kerja sama Regional terdiri dari 2 suku kata. *Kerja sama* dan *Regional*. *Kerja sama* berarti

interaksi yang dilakukan oleh dua negara (dalam konteks ASEAN ini) atau lebih dalam kurun waktu tertentu guna melaksanakan perjanjian atau konsensus yang telah disepakati secara bersama-sama demi tercapainya visi dan misi yang telah ditentukan, adapun sifat perjanjian atau konsensus tersebut telah didasarkan pada kepentingan dan cita-cita yang sama pula. Selain itu dalam *Kerja sama*, juga telah dibuat secara bersama-sama seperangkat aturan dan instrument hukum yang bersifat mengikat guna menjamin keefektifitasan atau komitmen dari negara-negara yang terlibat didalam suatu kerja sama tersebut.<sup>37</sup>

*Region* (dalam bahasa Inggris dan *Regional* dalam bahasa Indonesia) atau kawasan diartikan sebagai sekumpulan negara yang memiliki kedekatan geografis karena berada dalam satu wilayah tertentu. Meskipun demikian, kedekatan geografis saja tidak cukup untuk menyatukan negara dalam satu kawasan. Hettne dan Soderbaun mengemukakan bahwa kedekatan geografis tersebut perlu didukung adanya kesamaan budaya, keterikatan sosial dan sejarah yang sama. Dengan demikian, syarat terbentuknya satu kawasan dapat terpenuhi secara geografis dan struktural. Dengan logika ini, maka seharusnya semua kawasan di dunia dapat menjadi sekumpulan negara yang mendeklarasikan diri mereka sebagai satu kawasan yang sama. Namun pada kenyataannya, tidak semua kawasan memiliki intensitas interaksi dan kemajuan yang sama antara satu kawasan dengan yang lainnya.<sup>38</sup> Beberapa teoritis mengklasifikasikan suatu

---

<sup>37</sup> Dirangkum dari N.B Marbun, 2007. Kamus Politik. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan dan Edi Sihar, 1998. Buku Cerdas, Jakarta: Pustaka Delapratasa.

<sup>38</sup> Beeson Hettne, *The New Regionalism : A Prologue*. In Hettne, B. (ed), *The New Regionalism and the Future of Security Development*, Vol.4. London : Macmillan, 2000.

kawasan dalam lima karakteristik. *Pertama*, Negara-negara yang tergabung dalam suatu kawasan memiliki kedekatan geografis. *Kedua*, mereka memiliki pula kemiripan sosio kultural. *Ketiga*, terdapatnya kemiripan sikap dan tindakan politik seperti yang tercermin dalam organisasi internasional. *Keempat*, kesamaan keanggotaan dalam organisasi internasional. Dan *kelima*, adanya ketergantungan ekonomi yang diukur dari perdagangan luar negeri sebagai bagian dari proporsi pendapatan nasional.

Pendapat lain dikemukakan oleh Louis Cantori dan Steven Spiegel. Keduanya mendefinisikan kawasan sebagai dua atau lebih Negara yang saling berinteraksi dan memiliki kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterikatan sosial dan sejarah dan perasaan identitas yang seringkali meningkat disebabkan adanya aksi dan tindakan dari negara-negara luar kawasan.<sup>39</sup>

Dari penguraian masing-masing variabel dalam konsep *Kerja sama Regional* diatas menjadi jelas apa yang dimaksud dengan *Kerja sama Regional*, yaitu suatu interaksi/komunikasi/hubungan timbal balik yang dilakukan oleh dua negara atau lebih dalam suatu kawasan dimana negara-negara dalam kawasan tersebut memiliki kemiripan maupun kesamaan dalam hal kedekatan geografis, kesamaan etnis, bahasa, budaya, keterikatan sosial dan sejarah dan perasaan identitas dimana hubungan tersebut terjalin atas suatu kepentingan dan

---

<sup>39</sup> Anak Agung Banyu Perwita & Dr. Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005, hal.103-104

kesepakatan yang telah disepakati secara bersama-sama pula (motif ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan, HAM, dan lain-lain).

Kembali ke pokok permasalahan, kerja sama diantara sesama negara berkembang (termasuk juga ASEAN) dewasa ini merupakan fakta yang dapat diamati, dan merupakan gejala yang belum lama muncul. Selain ASEAN, contoh Kerja sama Regional lainnya adalah Forum Asia Pasifik (*the South Pasific Forum*), Organisasi Persatuan Afrika (*the Organization of Africa Unity*), Masyarakat Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (*the Economic Community of West African State*), Dewan Kerja sama Teluk (*the Gulf co-operation Council*), Dewan Persetujuan Cartagena (*le Conceil de l'Accord de Cartagene Andean Group*), Sistem Ekonomi Amerika Latin (*Systema Economica Latino Americano*), Persatuan Amerika Latin untuk Integrasi (*Association Latino Americano de Integration*), semuanya merupakan organisasi negara-negara sedang berkembang yang bekerja sama secara fungsional di Asia Tenggara, Pasifik Selatan, timur Tengah, Afrika dan Amerika Latin.

Lalu apa kepentingan mereka membentuk organisasi kawasan dan melaksanakan kerja sama regional? Kecenderungan bekerja sama itu sebagian besar mencerminkan keinginan negara-negara sedang berkembang untuk mengelola sumber-sumber daya nasional dan urusan regionalnya secara kolektif.<sup>40</sup> Tujuannya ialah memperbaiki keseimbangan dalam kerja sama yang kurang menguntungkan dengan negara-negara maju yang lebih kuat. Segera setelah

---

<sup>40</sup> Sebagaimana yang disampaikan oleh penulis buku *ASEAN menuju postur baru* C.P.F Luhulima dalam pengantar bab Dialog ASEAN-Forum Pasifik Selatan: Prospek Kerjasama Regional hal. 1

berhasil membentuk organisasi intraregional di antara sesamanya, negara-negara sedang berkembang itu mencari negara-negara maju tertentu untuk mengubah kerja sama bilateral yang kurang menguntungkan itu agar menjadi lebih menguntungkan. Secara tradisional di negara-negara maju inilah terdapat pembiayaan, pasar dan teknologi. Pendekatan regional itu membuka saluran-saluran Utara-Selatan dalam jumlah yang berarti untuk melaksanakan hubungan atau, dalam jargon ASEAN, Dialog Baru (*New Dialogue*).

Dimensi tujuan kerja sama dari organisasi regional seperti ASEAN ini pun bukan hanya sebagai arena dalam pengambilan keputusan politik luar negeri yang berorientasikan pada keseimbangan antara kepentingan nasional dan intraregional semata, melainkan sebagai alat untuk mendapatkan posisi tawar untuk menciptakan perjanjian perdamaian dan kerja sama yang saling menguntungkan di berbagai aspek dan penguatan area saling ketergantungan pada negara-negara super power.<sup>41</sup>

Disejumlah negara sedang berkembang seperti Indonesia ketergantungan dengan negara super power dapat masuk melalui berbagai aspek, terutama dalam aspek keamanan yang menjadikan *power* (kekuatan) sebagai tamengnya. Keamanan dalam disiplin ilmu HI merupakan masalah yang paling banyak dibahas dan dikaji oleh pestudi-pestudi ilmu ke-HI-an sejak disepakatinya konsep negara-bangsa dalam Perjanjian Westphalia pada tahun 1648. Dengan mengkaji masalah-masalah keamanan (terutama masalah perang dan militer pada saat itu)

---

<sup>41</sup> Mary Farrel and Bjorn Hette, dirangkum dari *Global Politics of Regionalism*, Pluto Press, 2005, page: 38-53.

pestudi HI banyak melahirkan ilmu-ilmu terapan yang diadopsi dari ilmu HI seperti resolusi konflik, diplomasi, integrasi ekonomi, politik internasional, kerja sama regional, gerakan sosial baru (NSM), dan lain-lainnya. Dengan isu keamanan pula dunia mengalami banyak perubahan dalam dinamika dan cara pandang mengenai pemahaman “hidup harmonis”. Namun sejak masalah perubahan iklim (climate change) menjadi isu hangat dalam hubungan internasional terjadi perubahan paradigma dalam memandang konsep keamanan.

Keamanan Tradisional memandang masalah keamanan timbul dari pihak luar (*eksternal*) seperti invasi militer, proyek nuklir, uji coba persenjataan kimia, dan lain-lain, sedangkan Keamanan Non-Tradisional memiliki cakupan yang lebih luas mengenai variabel keamanan, paradigma ini memandang masalah dalam keamanan manusia bukan hanya berasal dari pihak luar melainkan dari pihak dalam (*internal*) atau bahkan menjadi kabur---karena tanpa batas—seperti perdagangan manusia, imigran gelap, polusi asap, terorisme, peredaran narkoba, perubahan iklim, perbudakan transnasional (*transnational slavery*) dan lain-lain.<sup>42</sup> Pergeseran pemahaman mengenai paradigma keamanan semakin menambah kompleksitas hubungan antar negara-bangsa di dunia dan juga membuat tingkat kerapuhan (*fragility*) menjadi semakin tinggi, tak terkecuali yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sebagai salah satu inisioator pembentukan Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015) memiliki kepentingan tersendiri di kawasan, Indonesia sadar akan pergeseran paradigma keamanan dan

---

<sup>42</sup> Bahan kuliah regular Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, UMY dalam mata kuliah “*Politik Lingkungan Global*” oleh Adde M. Wirasenjaya, bulan Maret 2010

tahu akan konsekuensinya yaitu terjadi dinamika dalam Stabilitas Keamanan Regional.

Stabilitas keamanan adalah suatu kondisi/suasana dimana masing-masing negara mengharapkan hubungan tanpa kekerasan tanpa konflik dan peperangan dalam setiap penyelesaian masalah yang timbul dari perbedaan kepentingan nasional masing-masing negara.<sup>43</sup> Perlu digarisbawahi bahwa bentuk manifestasi dari stabilitas keamanan baik itu regional maupun internasional ialah bukan menciptakan negara tanpa musuh (*zero enemy*) ataupun hubungan tanpa konflik (*zero conflict*) dalam perpolitikan internasional. Melainkan adalah penguatan peran organisasi regional/internasional dan juga memaksimalkan *soft power* serta mengendepankan *soft diplomasi* dalam setiap penyelesaian masalah guna meminimalisir meletusnya peperangan. Konstelasi hubungan internasional telah berubah secara drastis pasca Perang Dingin, dimana dunia diwarnai oleh polarisasi yang telah mendorong kawasan dunia berkembang dan dunia maju untuk mempertegas kembali keberadaannya.<sup>44</sup> Begitu pula dengan regionalisme yang mulai intens dibicarakan di era pasca Perang Dingin. Karena dengan berakhirnya era kekuasaan bipolar tersebut, ternyata tidak serta merta meredakan konflik negara-negara di tingkat regional, tidak terkecuali di kawasan Asia Tenggara.

---

<sup>43</sup> Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 159. Dikembangkan dan disimpulkan dari pengertian *Security Community* karena hingga saat ini belum didapati pengertian dan tolak ukur yang absaha tentang apa yang dimaksud dengan Stabilitas Keamanan

<sup>44</sup> Dikutip dari <http://m.antaranews.com> edisi 12 Maret 2010.

Indonesia melalui Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015) yang terdiri dari 3 pilar (Komunitas Keamanan, Komunitas Ekonomi, dan Komunitas Sosial-Budaya) memiliki kesempatan untuk menciptakan stabilitas keamanan regional di Asia Tenggara. Berbicara lebih jauh lagi, kepentingan Indonesia di kawasan Asia Tenggara sesungguhnya bertolak dari kepentingan nasionalnya yaitu kebutuhan akan citra positif tentang Indonesia dan semakin menambah eksistensi Indonesia di kancah regional maupun internasional.

#### **E. Hipotesa**

Dengan melihat pokok permasalahan dan kerangka pemikiran yang ada diatas, maka penulis memberikan jawaban atas pokok permasalahan (Hipotesa) yaitu:

**“Kepentingan Indonesia Dalam Pembentukan Komunitas ASEAN 2015 (ASEAN Community 2015) adalah**

- 1. Menjamin Stabilitas Keamanan Regional (kawasan) Asia Tenggara**
- 2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Indonesia**
- 3. Meningkatkan Hubungan antar Masyarakat Negara ASEAN”**

## **F. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis lebih dominan menggunakan metode Kualitatif. Menurut John W. Creswell, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interpretatif dan menggunakan metode induktif. Penalaran induktif merupakan prosedur yang berpangkal dari peristiwa khusus sebagai hasil pengamatan empirik dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat umum. Untuk turun ke lapangan dan melakukan penelitian tidak harus memiliki konsep secara canggih tetapi cukup mengamati lapangan dan dari pengamatan lapangan tersebut dapat ditarik generalisasi dari suatu gejala. Dalam konteks ini, teori bukan merupakan persyaratan mutlak tetapi kecermatan dalam menangkap gejala dan memahami gejala merupakan kunci sukses untuk dapat mendiskripsikan gejala dan melakukan generalisasi.

Untuk lebih spesifik lagi penulis menerapkan *library research* (study kepustakaan) untuk menyusun penelitian ini dengan mencari sejumlah buku-buku mengenai studi-studi ASEAN. Penulis beranggapan dengan menggunakan buku-buku studi, penulis mampu mempertanggungjawabkan segala hal yang diminta oleh dosen pembimbing maupun dosen penguji dalam proses pembuatan skripsi ini. Selain buku-buku studi, penulis juga sangat mengandalkan media massa seperti internet, hasil wawancara yang telah terdokumentasi baik secara tertulis (hard copy) maupun masih dalam bentuk yang sederhana (soft copy), jurnal, artikel, majalah, surat kabar harian lokal, nasional maupun internasional, hasil seminar, diskusi, loka karya dan yang terakhir adalah mengumpulkan bahan-

bahan perkuliahan yang didapatkan selama ini. Walaupun demikian, penulis berkomitmen kepada institusi (UMY, khususnya kepada tim pembimbing skripsi di Program Studi Ilmu Hubungan Internasional) dan diri sendiri untuk mencantumkan catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka sebagai bentuk kejujuran dan anti plagiarisme selama penyusunan skripsi ini berlangsung.

Adapun cara penulis menganalisa data-data yang didapatkan untuk menghasilkan suatu analisa adalah mengumpulkan data-data yang menunjukkan kerja sama yang terdapat dan memiliki hubungan dengan pilar-pilar Komunitas ASEAN (APSC, AEC, ASCC) baik antara sesama anggota ASEAN, kerja sama antara anggota ASEAN dengan negara di luar kawasan dan kerja sama antara ASEAN dengan Organisasi Internasional (IGO maupun INGO). Pembahasanpun tidak hanya sebatas itu, melainkan penulis juga akan mengangkat manfaat-manfaat yang didapatkan oleh Indonesia dari macam-macam kerja sama tersebut dalam kurun waktu tertentu untuk kemudian diambil kesimpulan mengenai pencapaian kepentingan Indonesia dalam Komunitas ASEAN 2015.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Untuk menghindari perluasan dalam fokus pembahasan dan meminimalisir inkonsistensi pokok permasalahan yang diangkat dalam penyusunan skripsi ini, penulis berinisiatif membatasi pokok-pokok pembahasan dengan dimensi waktu dan bentuk kerja sama. Pokok-pokok permasalahan yang akan diangkat adalah kerja sama yang dilakukan oleh ASEAN, khususnya Indonesia sejak tahun 1997 yang merupakan titik awal pembentukan ASEAN Vision 2020 (dipercepat

menjadi tahun 2015 melalui Komunitas ASEAN) dimana negara-negara anggota ASEAN mulai bebas bereksperimen dan bergerak dinamis mengikuti alur kerja sama global hingga batas tahun 2010 tepatnya setelah pertemuan ASEAN-AS di New York bulan September yang lalu.

Adapun isu-isu yang akan diangkat penulis adalah hanya mengenai keterkaitan dalam pilar-pilar Komunitas ASEAN 2015 yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASCC). Namun, yang harus digarisbawahi adalah mengenai konsep Komunitas Keamanan ASEAN (ASC), sebagaimana yang telah dikemukakan oleh penulis sebelumnya, konsep Keamanan bukan hanya sebatas kerja sama militer tetapi makin meluas ke konsep keamanan pribadi manusia (*human security*), keamanan pangan, lingkungan, dan lain-lain.

## **H. Sistematika Penulisan**

Di dalam penulisan skripsi ini penulis membuat suatu sistematika penulisan agar dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca, adapun sistematika penulisannya terdiri dari:

Bab I, pada bab ini masih memberikan argument dan memperkuat landasan berpikir bagi penulis dalam menentukan hal-hal apa saja yang menjadi alasan penulis memilih judul skripsi dan bagaimana cara menganalisa kedepannya. Adapun Bab I ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka pemikiran, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, pada bab ini penulis akan membahas perkembangan ASEAN dari masa ke masa dipandang dari berbagai sudut, menggambarkan kepentingan Indonesia di dalam organisasi regional ASEAN dan peran Indonesia dalam sejumlah isu yang berkembang dalam kawasan Asia Tenggara (konflik internal di sejumlah negara ASEAN, isu lingkungan, kerja sama ASEAN dengan Mitra Wicara, dan lain sebagainya). Selain itu, dalam bab II ini penulis juga akan memperdalam pendeskripsian apa yang dimaksud dengan Komunitas ASEAN 2015 dengan ketiga pilarnya (Komunitas Keamanan, Komunitas Ekonomi dan Komunitas Sosial-Budaya).

Bab III, pada bab ini akan ada pembuktian hipotesa dengan menggunakan analisa teoritik. Penulis akan menunjukkan dengan menggunakan dat-data yang telah didapatkan bahwa kerja sama regional yang erat dan menguntungkan semua pihak yang terlibat didalamnya membawa hasil positif bagi stabilitas keamanan regional yang pada akhirnya akan bermuara pada stabilitas ekonomi kawasan, terutama Indonesia.

Bab IV, dalam bab itu penulis akan membuktikan bahwa telah terjadi peningkatan posisi tawar Indonesia di mata Internasional melalui kerja sama yang erat, berkesinambungan dan saling menguntungkan di bidang ekonomi. Manfaat-manfaat yang didapatkan oleh Indonesia sebagai strategi untuk meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia tersebut diperoleh dalam berbagai bentuk kerja sama perdagangan bebas ASEAN dengan negara-negara Mitra Wicara.

Bab V, penulis akan membahas atau mengangkat bentuk-bentuk kerjasama yang berorientasikan pada peningkatan hubungan antar Masyarakat ASEAN yang

diwujudkan dalam kerjasama Sosial-Budaya sehingga terjalin hubungan emosional antar elemen Masyarakat ASEAN.

Bab VI, bab ini berisikan rangkuman atau kesimpulan yang didapatkan dari bab-bab pembahasan diatas, bab ini juga akan disertai dengan paragraf penutup sebagai inti pokok permasalahan dari penulisan skripsi ini.